

# Kerjasama UNICEF Dengan DP3APPKB Surabaya Dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSE) Tahun 2023

<sup>1</sup>Charisma Putri Wangsa, <sup>2</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, <sup>3</sup>Triesanto Romulo Simanjuntak

<sup>123</sup>Universitas Satya Wacana, Indonesia

Korespondensi : charismaputriwangsa@gmail.com

## Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB dalam mencegah Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) di Kota Surabaya tahun 2023. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data resmi yang diterbitkan oleh DP3APPKB Kota Surabaya, dalam hal ini berupa jumlah angka kekerasan terhadap anak tahun 2023 serta data sekunder yang diperoleh melalui literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerjasama ini berhasil, terbukti dengan menurunnya angka kasus kekerasan terhadap anak sebesar 61,46 persen di tahun 2023. Selain itu, kerjasama ini juga berkontribusi dalam penguatan kapasitas relawan, penyediaan layanan perlindungan anak, intervensi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme dalam menganalisis implementasi kerjasama UNICEF dan DP3APPKB Kota Surabaya dalam mengatasi OCSEA yang berfokus pada upaya dan program yang dilakukan oleh kedua pihak melalui kerjasama.*

**Kata kunci:** Kerjasama, UNICEF, DP3APPKB, Online Child Sexual Exploitation and Abuse

## Abstract

*The purpose of this study is to see how the implementation of cooperation between UNICEF and DP3APPKB in preventing Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) in Surabaya City in 2023. Researchers use qualitative methods with primary data collection techniques obtained directly through interviews and official data published by the Surabaya City DP3APPKB, in this case in the form of the number of violence against children in 2023 and secondary data obtained through literature. The results showed that the implementation of this collaboration was successful, as evidenced by the decrease in the number of cases of violence against children by 61.46 percent in 2023. In addition, this collaboration also contributes to strengthening the capacity of volunteers, providing child protection services, cross-sectoral interventions, and increasing public awareness. This research uses the theory of liberalism in analyzing the implementation of cooperation between UNICEF and DP3APPKB Surabaya City in overcoming OCSEA which focuses on efforts and programs carried out by both parties through cooperation.*

**Keyword:** Partnership, UNICEF, DP3APPKB, Online Child Sexual Exploitation and Abuse

## 1. PENDAHULUAN

Isu mengenai kekerasan adalah masalah utama saat ini karena terjadi di berbagai negara, kekerasan tidak hanya bersifat fisik seperti pemukulan, penyerangan, pembunuhan dan tindakan fisik lainnya. Akan tetapi, sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas baik secara langsung maupun daring serta menyebarkan video atau foto yang tidak pantas melalui media sosial (Istianingsih N & Bungo, 2020). Pada era digital saat ini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bersamaan dengan kemajuan teknologi muncul pula ancaman baru yang mengintai anak-anak, salah satunya *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) atau eksplorasi dan pelecehan seksual terhadap anak melalui internet atau media sosial. OCSEA adalah salah satu bentuk pelecehan dan

eksploitasi yang sepenuhnya terjadi melalui teknologi digital atau campur tangan interaksi daring dan tatap muka antara pelaku dan anak-anak (Nurlela, 2023). OCSEA juga merupakan masalah yang dapat mempengaruhi anak-anak di seluruh dunia karena praktik dari OCSEA dimulai dari berbagai tampilan kekerasan/eksploitasi anak, *sexting*, pemerasan seksual, *grooming online*, *streaming langsung* dan *cyber bullying* serta distribusi konten pornografi anak (Syafnita T, 2023). Di era digital saat ini bentuk kejahatan seperti itu disimpan secara permanen kemudian disebarluaskan terus menerus sehingga memiliki dampak yang merugikan anak-anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ECPAT Indonesia, pada tahun 2020 terdapat sekitar 287 responden anak usia 6-17 tahun yang mengalami hal buruk saat berinternet di masa pandemi (Kusumaningrum, 2023). Menurut *WeProtect Global Aliance*, OCSEA adalah masalah serius dan semakin meningkat di seluruh dunia namun, sebagian besar anak-anak yang menjadi korban dan terkena dampak isu ini memilih untuk tidak melaporkannya ke orang tua atau pihak berwajib karena takut akan ancaman dari pelaku (Aliance, 2020). *WeProtect Global Aliance* juga mencatat bahwa jumlah laporan konten penyalahgunaan seksual anak di seluruh dunia telah meningkat sebesar 87 persen sejak tahun 2019 (OHCHR, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa dengan banyaknya manfaat intenet dan produk digital tidak menutup kemungkinan konten penyalahgunaan seksual anak semakin meningkat. UNICEF menyatakan bahwa sekitar 80 persen anak di 25 negara melaporkan merasa dalam bahaya akan penyalahgunaan atau eksploitasi seksual secara *online* (UNICEF, n.d.). Menurut laporan UNICEF, Interpol, dan ECPAT sekitar 17 hingga 56 persen anak di Indonesia mengalami berbagai bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan *online* ataupun pengalaman yang tidak diinginkan (UNICEF, 2022). Dengan adanya fakta-fakta ini, dapat dilihat bahwa OCSEA adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan serius di tingkat global.

Isu mengenai OCSEA tidak mengenal batas geografis, internet memungkinkan pelaku dari satu negara untuk mengeksplorasi anak-anak di negara lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan global untuk menangani masalah ini salah satunya dengan campur tangan organisasi internasional seperti UNICEF yang memiliki perhatian khusus pada anak-anak. *United Nations Children's Fund* adalah sebuah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan wanita di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang (Regina et al, 2023). Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki pengaruh dan sumber daya yang diperlukan untuk memobilisasi dukungan dan tindakan di tingkat global, UNICEF juga dapat membantu memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk menangani masalah OCSEA berkembang (Regina et al, 2023). Dampak yang dirasakan oleh korban OCSEA sangat serius dan merusak karena korban bisa mengalami trauma psikologis, kerugian pendidikan bahkan beresiko mengalami kekerasan fisik hingga kematian. Di beberapa negara seperti di Filipina, pemerintahnya telah mengeluarkan undang-undang dalam memberikan perlindungan lebih kuat terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual secara online yang telah resmi disahkan pada 30 Juli 2022 Undang-Undang Republik 11930 atau Undang-Undang *the Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children* (Trisnawati & Rijal, 2022). Di Amerika Serikat juga telah mengeluarkan Undang-Undang tahun 1872 yang mengkriminalisasi penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menipu atau mengeksplorasi anak-anak (Legislative, n.d.).

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan berupa undang-undang dan kebijakan untuk mencegah dan menangani OCSEA diantaranya yaitu, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dapat mengurangi resiko eksploitasi seksual anak lewat *online* (Sofian, 2020). Selain kebijakan ada juga Undang-Undang N0. 35/2014 Pasal 15 tentang Perlindungan Anak, termasuk kekerasan seksual anak (Indonesia). Secara nasional eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak melalui internet kian meningkat karena anak-anak di Indonesia sudah mulai menggunakan internet sejak usia muda. Berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia

(APJII) terdapat 210 juta pengguna internet pada tahun 2022 dengan jumlah pengguna paling tinggi mulai usia 5-18 tahun (PMK, 2023). Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan internet, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban eksplorasi dan pelecehan seksual ranah privat seperti *chat room*. Sesuai dengan data KPAI tahun 2022 kasus kejahatan seksual pada anak berjumlah 834 kasus baik yang terjadi di ranah lembaga pendidikan maupun media sosial. Provinsi dengan angka pengaduan kekerasan seksual terbanyak adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan jumlah 108 kasus (KPAI, 2022).

Jawa Timur sebagai provinsi yang menduduki urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus kepada anak salah satunya dengan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh Kabupaten atau Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 90 ayat 2 (DP3AK Jatim, 2022). Surabaya menjadi kota pertama dengan angka kekerasan tertinggi terhadap anak se-Jawa Timur, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh DP3APPKB Surabaya jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 terdapat 88 kasus yang dilaporkan (Hafzari & Kriswibowo, 2023). Selanjutnya di tahun 2020 sebanya 75 kasus, tahun 2021 sebanyak 87 kasus yang dipengaruhi oleh masalah ekonomi hingga sosial (Hafzari & Kriswibowo, 2023). Kemudian di tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pelaporan menjadi 123 kasus yang dipengaruhi oleh pelecehan seksual, penelantaran dan perundungan (Hafzari & Kriswibowo, 2023). Berdasarkan data diatas, penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong para korban agar melaporkan kejadian apapun kepada pihak berwenang.

Kota Surabaya memiliki dinas yang langsung menangani berbagai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) serta sudah memiliki Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap kelurahan. Hadirnya DP3APPKB Kota Surabaya ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 (Surabaya, 2023). Prioritas dari DP3APPKB Kota Surabaya adalah mengoptimalkan pencegahan stunting dengan intervensi calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), dan ibu pasca nifas (bufas) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (DP3APPKB Surabaya, 2023). Selain itu, DP3APPKB Kota Surabaya juga melakukan penjangkauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebagai bukti komitmen integritas Kota Surabaya mengikuti *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI) dan menjadi satu-satunya kota contoh Layak Anak yang diusung oleh UNICEF (Febrinastri & Firmansyah, 2023). Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pentingnya kerjasama dalam mengatasi isu-isu yang berhubungan dengan anak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Safira *et al.*, (2023) yang berfokus pada implementasi kerjasama antara Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi eksplorasi ekonomi anak melalui *Country Program Action Plan* (CPAP). Berbeda halnya dengan penelitian kali ini karena penelitian ini akan menekankan pada faktor dan hasil hubungan kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Kota Surabaya dalam mencegah *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) mengingat fenomena ini semakin meningkat dan pentingnya peran DP3APPKB Kota Surabaya serta UNICEF sebagai instansi yang memiliki perhatian lebih terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini juga menjadi menarik karena merupakan studi pertama yang meneliti fenomena OCSEA di Kota Surabaya dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur akademik tetapi juga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam mencegah OCSEA.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori liberalisme karena teori ini hadir tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional tetapi juga secara tradisional perspektif ini menawarkan berbagai teori politik global (Dugis, 2018). Menurut kaum liberal, pemerintah memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi dari kepentingan aktor-aktor domestik yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan negara dan memandang bahwa karakter suatu rezim politik menentukan sifat hubungan

internasional. Oleh karena itu, muncul teori perdamaian demokratisasi yang menyatakan bahwa negara demokratis memiliki kecenderungan damai karena demokrasi menjamin kontrol masyarakat terhadap pemerintah (Rosyidin, 2022). Kemudian bagi liberal, interdependensi adalah karakteristik hubungan internasional yang percaya bahwa untuk membangun perdamaian di tengah-tengah dunia yang anarki perlu adanya relasi antar bangsa yang didominasi oleh kerjasama, hal ini dilakukan juga untuk meminimalisir rasa saling curiga yang memicu peningkatan kekuatan militer (Rosyidin, 2022). Dalam penelitian ini, kerjasama antara UNICEF sebagai organisasi internasional dan DP3APPKB Kota Surabaya sebagai lembaga pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah anak di Kota Surabaya bisa dianggap sebagai bentuk kerjasama internasional karena keduanya sama-sama memiliki fokus untuk melindungi hak anak, menjamin literasi digital anak dan memastikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi *online*. Dari latar belakang mengenai masalah kekerasan terhadap anak yang semakin marak terjadi, membuat peneliti tertarik ingin mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai bukti bahwa Surabaya menjadi Kota Layak Anak. Dengan tujuan penelitian adalah menjelaskan hasil kerjasama UNICEF dan DP3APPKB dalam mencegah *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* tahun 2023 di Kota Surabaya.

## 2. METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pengamatan mendalam dan lebih menekankan pada pengamatan fenomena serta lebih meneliti ke substansi makna fenomena tersebut. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu peristiwa, dinamika sosial, sikap dan persepsi (Zuchri, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur seperti buku, jurnal, berita, dokumen resmi berupa data rekapan jumlah kekerasan terhadap anak di Surabaya tahun 2023 dan wawancara Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Kepala Bidang PPA Surabaya yang menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit amatan penelitian ini adalah tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang berbasis online. Kemudian, unit analisa penelitian ini adalah peran dan kontribusi dari UNICEF dan DP3APPKB dalam mengatasi OCSEA di Surabaya dengan berfokus pada program dan kebijakan seperti dukungan pemerintah dan masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Surabaya

#### Fenomena Kekerasan Terhadap Anak di Kota Surabaya

Kasus kekerasan terhadap anak adalah bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik maupun psikis dan kekerasan seksual yang mengakibatkan sakit fisik, batin, mental hingga kematian (Margareta *et al.*, 2020). Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, pelaku dari tindakan ini juga bisa keluarga, teman, kenalan atau orang yang tidak dikenal. Kota Surabaya tidak luput dari tindak kekerasan terhadap anak meski telah menjadi salah satu kota metropolitan yang menyandang status Kota Layak Anak (Manumoyoso, 2024). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh LPA Jatim, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 88 kasus dari 90 kasus di tahun 2018 (Hafzari & Kriswibowo, 2023). Penurunan kasus kekerasan ini karena ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya yakni dengan menjadikan Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Hal ini adalah bentuk keseriusan dari Walikota Surabaya dalam menghadapi isu perlindungan anak, selain itu pemerintah juga membuat taman dan fasilitas publik yang ramah terhadap anak di Kota Surabaya (Firdausi, 2021). Tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya mengalami penurunan menjadi 75 kasus

dari 88 kasus di tahun sebelumnya, kebanyakan dari kasus yang dilaporkan adalah kekerasan yang terjadi di rumah tangga seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis (Rahmawati et al, 2023). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui DP3APPKB adalah membentuk PUSPAGA dengan pelayanan kursus pra nikah, kegiatan ini memasukan materi edukatif seputar kehidupan berumah tangga, aspek-aspek kesiapan mental, spiritual dan finansial. Selain itu, DP3APPKB Kota Surabaya juga melaksanakan upaya penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan layanan seperti identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial (Rahmawati et al, 2023).

Pada tahun 2021 angka kasus kekerasan mengalami kenaikan yakni 87 kasus, hal ini disebabkan karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditambah lagi dengan wabah Covid-19 yang menjadi alasan melonjaknya kasus kekerasan. Selain itu, dari adanya pandemi ini menimbulkan masalah lain yaitu permasalahan ekonomi yang mempengaruhi psikologis sehingga seseorang akan melampiaskan amarah dan kekecewaan pada orang terdekat dalam lingkup keluarga (Oktaviani. 2022). Penanganan yang dilakukan pemerintah Surabaya dalam mengatasi kekerasan terdapat beberapa strategi diantaranya, melakukan penyuluhan anti kekerasan berbasis gender untuk memberi pengetahuan pada masyarakat, kemudian adanya penanganan anti krisis dengan melibatkan lembaga dan tokoh masyarakat, selanjutnya ada konseling pada keluarga yang mengalami KDRT (Oktaviani. 2022). Berdasarkan data dari DP3APPKB Kota Surabaya kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 123 kasus, salah satu penyebabnya adalah kegagalan keluarga dalam memenuhi tanggungjawab mereka sebagai orangtua, ditambah dengan lemahnya program pemerintah untuk membantu keluarga dalam menjaga dan merawat anak-anak mereka (Mukhaiyarah et al, 2024). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya semakin meningkatkan upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap anak-anak melalui PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga dibawah naungan DP3APPKB Kota Surabaya. Layanan PUSPAGA bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya secara *offline* maupun *online*, di dalamnya masyarakat bisa merasakan layanan konsultasi serta konseling oleh profesional dalam bidang psikologi, sosialisasi seputar masalah keluarga melalui IG *live* dan kelas *parenting* di setiap PUSPAGA Balai RW (Mukhaiyarah et al, 2024). Selain itu, ada juga kolaborasi lintas sektor yang memiliki fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya. Kolaborasi ini diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB Kota Surabaya yang menjalin kolaborasi dengan LSM Embun dan *Surabaya Hotel School*, hasil dari kolaborasi ini dianggap sebagai suatu hal yang positif karena masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual mulai berani melaporkan kekerasan ke pihak berwajib (Rahmawati et al, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, kasus kekerasan terhadap anak terlihat menurun menjadi 74 kasus. Rata-rata kasus yang dilaporkan bersumber dari penggunaan media sosial dan pola asuh orang tua yang salah, sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB adalah dengan menguatkan pembentukan 207 PUSPAGA Balai RW dengan tujuan untuk memberikan bimbingan konseling bagi orangtua untuk memahami peran mereka dalam membentuk karakter anak (DP3APPKB, 2023). DP3APPKB juga menyelenggarakan kegiatan Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA) demi menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal melalui sosialisasi dengan melibatkan relwan, tokoh masyarakat, lembaga pemerhati perempuan dan anak serta elemen masyarakat (Pemkot, 2023). Selain itu, DP3APPKB Surabaya juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Surabaya dan Forum Anak Surabaya melalui program Sinau dan Ngaji Bareng di Balai RW sehingga anak-anak mengalami pembentukan karakter yang baik sejak dini. Kemudian, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program sosialisasi dinamika remaja yang melibatkan akademisi, psikolog, Aparat Penegak Hukum (APH) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai bentuk deteksi dini permasalahan dan potensi terhadap anak di tingkat SD-SMP (Pemkot, 2023). Menurut hasil wawancara dengan Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, DP3APPKB juga

menjalankan kerjasama dengan UNICEF dan PLATO Foundation dalam mengatasi eksplorasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi secara *online*. Pada tahun 2023, terlihat bahwa Pemerintah Kota Surabaya semakin peduli akan masalah kekerasan terhadap anak dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang membentuk karakter anak dan orangtua serta memperluas kerjasama lintar sektor dari tahun-tahun sebelumnya.

#### *Faktor Kekerasan Terhadap Anak di Kota Surabaya Tahun 2023*

Terdapat beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan diantaranya, 1). Jenis kekerasan melalui media sosial, dalam era digital saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari namun, media sosial menjadi *platform* bagi pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak-anak (Jatim, 2023); 2). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni kasus yang terjadi dalam lingkungan keluarga seperti pemukulan, seksual, dan penelantaran. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak dan dapat memicu perilaku agresif (Muhamad, 2023); 3). Anak berhadapan dengan hukum (ABH), kasus ini melibatkan anak sebagai pelaku tidak pidana atau anak-anak yang berkonflik dengan hukum (Hasana, 2023); 4). Kekerasan seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual secara langsung seperti sentuhan dan dipaksa berhubungan seks. Ada juga kekerasan seksual nonkontak seperti melihat kegiatan seksual, menonton video seksual, mengirim dan melihat gambar, foto atau teks kegiatan sekual (DP3APK Jatim, 2021).

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini di Kota Surabaya bukanlah tanpa sebab, melainkan ada banyak faktor pendorong yang melatarbelakanginya. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak anak. Banyak orang masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran (DP3APPKB, 2024). Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap kasus kekerasan anak di Kota Surabaya adalah kurangannya pegawasan dan perlindungan terhadap anak sejak dulu. Banyak ditemui beberapa anak yang mungkin tidak memiliki pengawasan yang memadai dari orang tua atau pengasuh, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan (DP3APPKB, 2024). Faktor berikutnya karena rendahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak, ketika pelaku kekerasan terhadap anak tidak ditindak atau dihukum dengan tegas maka hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak dan memicu terjadinya lebih banyak kasus kekerasan (DP3APPKB, 2024).. Seringkali anak-anak yang menjadi korban pun takut untuk melapor ke orang tua atau pihak berwajib karena mendapat Ancaman dari pelaku. Faktor sosial dan ekonomi juga dapat berperan dalam meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan terhadap anak (Elaine, 2024). Penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak-anak. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga perlindungan anak dan individu sangat diperlukan demi mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya.

Bagi anak yang menjadi korban kekerasan tentunya mereka berada di posisi yang tidak aman maka dari itu hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Surabaya. Untuk menindaklanjuti tindakan ini, maka dikeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 yang mana Perda ini adalah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak di Kota Surabaya (JDHI, 2023). Kemudian ada juga berbagai program yang telah dijalankan oleh DP3APPKB Kota Surabaya sebagai instansi pemerhati perempuan dan anak di Kota Surabaya, diantaranya:

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak (KIE PPA): Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Program ini melibatkan penjangkauan dan pendampingan psikologis oleh Tim UPTD PPA DP3APPKB Kota Surabaya (PPA, n.d).
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA): Program ini fokus pada pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan penelantaran (Pemkot, 2023).

- Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak: Program ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Melalui program ini, DP3APPKB Kota Surabaya berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak melalui kelas *parenting*, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Pusat Pembelajaran Keluarga Balai RW dan layanan konsultasi SIAP-PPAK (Pemkot, 2023)

Sejalan dengan berbagai program ini DP3APPKB Kota Surabaya membangun hubungan kerjasama dengan beberapa instansi yang memiliki perhatian khusus terhadap perempuan dan anak salah satunya UNICEF (DP3APPKB, 2023). Kota Surabaya juga telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

#### *Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Surabaya Tahun 2023*

Penelitian ini memperlihatkan jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya yang ditangani oleh UPTD PPA tahun 2023. Tingkat kekerasan ini meliputi eksplorasi dan seksual yang terjadi di ranah daring dan luring, berdasarkan data dari LPA Jawa Timur tindak kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya pada tahun 2020-2021 tercatat ada 162 kasus kekerasan (Sholahuddin, 2022). Kemudian di tahun 2022 terdapat 123 kasus kekerasan yang dialami anak-anak dipengaruhi oleh masalah ekonomi hingga sosial (Hafzari & Kriswibowo, 2023). Selanjutnya di tahun 2023 terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak menjadi 74 kasus, hal ini dipengaruhi karena orangtua bercerai hingga pengaruh media sosial.

#### **DATA UPTD PPA TAHUN 2023**

<b>JENIS KASUS</b>	<b>2023</b>		<b>Grand Total</b>
	<b>Daring</b>	<b>Luring</b>	
Kekerasan	1	73	74
Eksplorasi		10	10
Seks	1	63	64
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>74</b>

**Gambar 1 Data Resmi UPTD PPA Tahun 2023, (Diolah kembali oleh peneliti, 29 Februari 2024)**

Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3APPKB Kota Surabaya, angka kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya dan dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya yang ingin memberikan rasa aman bagi anak-anak serta sebagai bukti bahwa Surabaya pantas mendapat predikat Kota Layak Anak. Tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB Kota Surabaya banyak melakukan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak diantaranya kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Forum Anak melalui program Sinau dan Ngaji Bareng di Balai RW, ada pula kerjasama dengan UNICEF dan PLATO Foundation dalam mencegah eksplorasi dan kekerasan seksual terhadap anak secara *online*. Jika dibandingkan dengan hubungan kerjasama yang di jalin antara Pemerintah Kota Surabaya, LSM Embun dan *Surabaya Hotel School* di tahun 2022 sama-sama memberikan dampak yang baik sesuai dengan tujuan masing-masing namun, di tahun 2022 angka kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat yang dipengaruhi oleh kesalahan orangtua dalam membina anak sejak dini ditambah lagi dengan peran pemerintah yang sangat minim dalam memberikan bimbingan terhadap keluarga.

## Implementasi Kerjasama UNICEF dan DP3APPKB Kota Surabaya Dalam Mencegah *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) tahun 2023

### Mekanisme Kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Kota Surabaya

Berdasarkan wawancara dengan kepala DP3APPKB Kota Surabaya, mekanisme kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Kota Surabaya dalam mencegah eksplorasi seksual anak secara online berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan *Programme Cooperation Agreement between Yayasan PLATO and United Nations Children's Fund No. IDS/PCA2022274 for Programme Document No. PD2022525 Under Output 5.2 (Adolescent Engagement on Child Protection) and Output 5.4 (Child Protection Services)* pada tanggal 7 Desember 2022. Kerjasama ini diawali saat Yayasan PLATO bekerjasama dengan UNICEF dalam pelaksanaan Program Mempromosikan Lingkungan yang Aman Melalui Pendekatan Kesadaran dan Respon atau *Safe Environment Through Awareness and Response Approach* (SETARA), kerjasama ini dilakukan untuk mencegah dan merespon berbagai isu tentang kekerasan berbasis gender (KBG) serta kekerasan dan eksplorasi seksual terhadap anak di ranah digital atau *online child sexual exploitation and abuse* di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya (Wawancara Kepala DP3APPKB, 28 Februari 2024). Untuk mensukseskan program ini maka Yayasan PLATO dan DP3APPKB Kota Surabaya melakukan berbagai program salah satunya dengan terlaksananya *Child Protection Management Program* (CPMP) tahun 2024.

Dalam pelibatan hubungan kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Kota Surabaya telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan *Capacity Building* Relawan PKBM Kecamatan, Satgas PPA Kelurahan, Pokja 1 TP PKK Kecamatan, TPPK Satuan Pendidikan Jenjang SD hingga SMP, dan Fasilitator PUSPAGA Balai RW. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan upaya pemerintah dan juga sebagai penyedia layanan perlindungan anak dalam menghadapi dan melakukan pencegahan kekerasan perempuan dan anak termasuk OCSEA dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak yang telah diusung oleh UNICEF (Febrinastri & Firmansyah, 2023). Hubungan kerjasama ini semakin diperkuat juga karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat tentang pengetahuan terhadap dampak yang ditimbulkan OCSEA serta minimnya kontrol orang tua terhadap penggunaan perangkat dan *platform* yang digunakan anak. Kota Surabaya yang beragam dan banyaknya warga pendatang menjadikan semua pihak yang mempunyai kewenangan dalam perlindungan anak terus bersinergi dalam penguatan kerjasama.

### Hasil Kerjasama UNICEF dan DP3APPKB Dalam Mencegah OCSEA

Dari kerjasama yang telah dijalin menghasilkan berbagai langkah konkret dalam mencegah dan menangani kasus OCSEA yakni dengan upaya dari pemerintah kota dan lembaga terkait yang telah mengadakan berbagai pelatihan baik untuk anak-anak, para guru, orang tua dan para pendamping. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala DP3APPKB dan Kepala PPA Kota Surabaya ada berbagai kegiatan edukasi yang telah diberikan untuk membentuk kesadaran akan potensi ancaman yang bisa ditimbulkan dari dunia maya, beberapa kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penguatan kapasitas atau *capacity building* sebagai agenda rutin dengan sistem ToT (*Training of Trainers*). Pelaksanaan tersebut menyasar pada kalangan relawan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyalur informasi pada masyarakat. Tiga unsur relawan yang dilibatkan yakni Relawan PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) Kecamatan, Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kelurahan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK);
- b. Adanya peningkatan kapasitas bagi relawan melalui kegiatan *Child Protection Management Program* (CPMP);
- c. Penyediaan berbagai layanan yang ada di UPTD PPA meliputi layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan medis, hukum dan psikologi;

- d. Penyediaan layanan fasilitas *shelter* anak berhadapan hukum dan *shelter* anak perempuan korban kekerasan;
- e. Pelaksanaan intervensi lintas sektor berdasarkan kebutuhan klien;
- f. Penyediaan berbagai layanan yang ada di PUSPAGA Kota Surabaya meliputi konseling/konsultasi awal, konseling/konsultasi lanjutan, kelas *parenting*, promosi sosialisasi dan edukasi, PUSPAGA *Goes to Community*, penyelenggaraan PUSPAGA Balai RW, penyelenggaraan kelas calon pengantin, penyelenggaraan *talkshow*, *instagram live* serta kelas inspirasi bersama Walikota.
- g. Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB menjalin kerjasama dengan PLATO Foundation dan UNICEF dalam mengadakan *Training Pencegahan dan Penanganan Awal Kekerasan dan Eksplorasi Seksual pada Anak di Ranah Daring* bagi Fasilitator Masyarakat dan Komunitas Remaja di Kota Surabaya.

Hasil dari kerjasama ini sangat efektif karena Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bahaya eksplorasi seksual anak secara *online* telah bekerjasama dengan pihak-pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non-Governmental Organization (NGO), rekan-rekan media massa, dan seluruh elemen masyarakat. Peningkatan kesadaran di tengah-tengah masyarakat juga dilakukan secara masif dan massal melalui berbagai kegiatan CPMP maupun melalui publikasi media cetak dan elektronik. Dalam hal ini DP3APPKB Kota Surabaya juga berjejaring dengan tim multidisiplin seperti kepolisian maupun lembaga hukum guna untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, aparat penegak hukum berperan penting sesuai kewenangannya yaitu dalam upaya penegakan hukum meliputi pelaporan kasus ke ranah hukum, pelaksanaan mediasi atau *restorative justice*. Pencegah OCSEA di Kota Surabaya yang melibatkan banyak pihak sangat diperlukan, karena semakin banyak sumbangsih peran dari berbagai pihak maka suatu masalah dapat dikurangi dan perdamaian bisa di dapatkan. Hal ini berhubungan dengan teori yang digunakan yaitu teori liberalisme, menurut teori ini suatu masalah atau konflik bisa dikurangi dengan adanya kerjasama, reformasi atau tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Rosyidin, 2022).

Berdasarkan teori liberalisme suatu perdamaian dunia bisa tercapai dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan serta keadilan. Dalam penelitian ini, upaya pencegahan eksplorasi seksual anak secara *online* berhubungan langsung dengan hak asasi anak untuk hidup bebas dari eksplorasi dan kekerasan. Kemudian, kerjasama antara DP3APPKB Kota Surabaya yang dikenal sebagai entitas lokal di Indonesia dan UNICEF yang adalah organisasi internasional merupakan contoh nyata dari kerjasama internasional yang menghasilkan manfaat bersama dalam hal ini pencegahan eksplorasi seksual anak secara *online* tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional secara keseluruhan. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian sebelumnya dengan judul implementasi kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi eksplorasi ekonomi anak di Indonesia Tahun 2017-2020. Penelitian terdahulu menggunakan teori eksplorasi anak menurut tokoh Terry E Lawson (Safira et al, 2023), teori eksplorasi anak membahas tentang sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap seorang anak dibawah umur yang dilakukan oleh orangtua atau keluarga guna melakukan kegiatan yang memberikan keuntungan dalam segi sosial, politik dan ekonomi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penggunaan teori, penelitian ini berfokus pada teori liberalisme yang melihat nilai-nilai hak asasi manusia dan kerjasama internasional untuk mengatasi OCSEA.

Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak melalui berbagai hubungan kerjasama dengan pihak internasional maupun lokal sesuai dengan teori liberalisme dalam hal ini nilai kerjasama untuk mengatasi suatu masalah yang tentunya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya, Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan membangun kerjasama sejak tahun 2022. Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB Kota Surabaya membangun

kerjasama dengan LSM Embun dan *Surabaya Hotel School* (Rahmawati et al, 2023). Ketiga pihak ini memiliki kapasitas, kompetensi dan spesialisasi keahlian masing-masing dalam memberikan penanganan kekerasan seksual pada anak. LSM Embun dengan kapasitasnya mampu menangani anak-anak korban kekerasan seksual terutama dalam pendampingan dan advokasi sedangkan *Surabaya Hotel School* berperan dalam memberikan pelatihan kepada anak-anak sesuai dengan kurikulum perhotelan dan hal ini menjadi modal untuk ketersediaan fasilitas pendidikan serta SDM yang merupakan pengajar dan praktisi sehingga setiap ilmu teknis di bidang perhotelan selalu terbarukan (Rahmawati et al, 2023). Kemudian DP3APPKB Kota Surabaya khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melaksanakan sinkronisasi program dan kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak serta memiliki kapasitas dalam melakukan konseling, menganalisa permasalahan, pengetahuan mengenai teknologi informasi. Hubungan kerjasama ini terus berlanjut hingga tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya memperluas hubungan kerjasama dengan UNICEF dan PLATO Foundation dalam mengatasi eksplorasi dan kekerasan seksual pada anak secara online (Hasil Wawancara dengan Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Februari 2024). Hasil dari kerjasama ini berdampak positif karena terjadi penurunan kekerasan terhadap anak di tahun 2023, namun hal ini masih menjadi tugas bagi Pemerintah Kota Surabaya agar terus bersinergi untuk memberikan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

#### 4. KESIMPULAN

Isu kekerasan adalah masalah utama yang terjadi di berbagai negara. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan sikap melecehkan dan penyebaran konten tidak pantas melalui media sosial. Dalam era digital, muncul ancaman baru seperti *Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA)* yang merugikan perkembangan dan kesejahteraan anak. UNICEF dan DP3APPKB Kota Surabaya bekerja sama untuk mencegah OCSEA. Implementasi dari kerjasama ini dapat dilihat dari langkah-langkah konkret yang dilakukan berupa penguatan kapasitas relawan, penyediaan layanan perlindungan anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui kerjasama ini, kasus kekerasan di Kota Surabaya mengalami penurunan 61,46 persen dari 123 kasus di tahun 2022 menjadi 74 kasus tahun 2023. Mekanisme kerjasama antar dua instansi ini berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang relevan serta melibatkan lintas sektor dan lintas aktor.

#### 5. SARAN

Saran peneliti untuk Pemerintahan Kota Surabaya adalah pentingnya memberikan pendidikan kesadaran pada masyarakat tentang OCSEA dan edukasi anak-anak mengenai risiko dan taktik manipulatif pelaku OCSEA. Selain itu, peran orangtua juga penting karena komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak akan mempermudah akses orangtua untuk menjaga dan memahami kegiatan online mereka. Orangtua juga dapat belajar tentang teknologi dan menggunakan kontrol orangtua pada perangkat dan platform yang digunakan anak. Kemudian anak juga dapat diajarkan tentang pentingnya keamanan privasi dan mengajarkan anak untuk tidak memberikan informasi pribadi secara berlebihan. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya dengan melihat berbagai faktor risiko, dampak jangka panjang atau evaluasi efektivitas program dalam mencegah OCSEA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai upaya dalam mencegah OCSEA bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Arifin, S., & Rahman, K. (2021). Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.19812>
- [2] DP3AK. (2022). Kabupaten/Kota di Jatim Diharapkan Tetap Berkomitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak. *dp3ak.jatimprov.go.id*: <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/165>
- [3] DP3APPKB. (2024). DP3A-PPKB Surabaya Mengungkap Multifaktor Penyebab Terjadinya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. *Surabaya.go.id*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/78305/dp-3-a-ppkb-surabaya-ungkap-multifaktor-penyebab-terjadinya-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>
- [4] DP3APPKB. (2023). Petunjuk Teknis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW. *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya*.
- [5] DP3APPKB. (2023). Surabaya Kota Layak Anak, Pelayanan PUSPAGA Sampai di Balai RW. *DP3APPKSurabaya.go.id*. <https://dp3appkb.surabaya.go.id/surabaya-kota-layak-anak-pelayanan-puspaga-sampai-di-balai-rw/>
- [6] Dugis, V. (2018). *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press. [https://books.google.co.id/books?id=Jg2QDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Jg2QDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- [7] Elaine Meilita. (2024). DP3APPKB Kota Surabaya: Ada 6 Faktor Penyebab Kekerasan Perempuan dan Anak. *SuaraSurabaya.net*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/dp3appkb-kota-surabaya-ada-6-faktor-penyebab-kekerasan-perempuan-dan-anak/>
- [8] Faisea, M.Z.M., & Arif, L. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i6.338>
- [9] Febrinastri, F., & Firmansyah, I. (2023). Satu-Satunya di Indonesia, Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2023/02/16/110036/satu-satunya-di-indonesia-surabaya-menuju-kota-layak-anak-dunia>
- [10] Firdausi, D.R.S. (2021). Citra Tri Rismaharini Sebagai Pemimpin Peduli Anak (Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Pada Siaran Pers Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019). *The Commercium*, 4(02), 12-18. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41282>
- [11] Hafzari, A.D. (2023). Policy Output Analysis Pada Pencegahan Kekerasan Anak Dalam Keluarga Melalui Layanan Puspaga Di Surabaya. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(2), 104-117. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/14045>
- [12] Hasana Khusnul. (2023). 173 Kekerasan Terjadi di Surabaya Sepanjang 2023. *TimesJatim*. <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-hasana/173-kekerasan-terjadi-di-surabaya-sepanjang-2023>
- [13] Istianingsih, N., & Afriany, F. (2020). Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (I April), 9-22. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/590>
- [14] Jatim, A. (2023). Kekerasan Anak di Surabaya Karena Salah Penggunaan Medsos. *Jatim.antaranews.com*: <https://jatim.antaranews.com/berita/702462/kekerasan-anak-di-surabaya-karena-salah-penggunaan-medsos>
- [15] KPAI. (2022). CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUHAN POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEbas DARI KEKERASAN.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>
- [16] Kusumaningrum, A. L. (2023). #JAGABARENG Dari Bahaya Eksplorasi dan Penyalahgunaan Seksual Anak di Ranah Daring. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30318>
- [17] Legislative, C. (n.d.). PENAL CODE 288.3 (Issue c).
- [18] Manumoyoso, A.H. (2024). Ironi Surabaya, Darurat Kejahatan Seksual di Kota Ramah Anak. *Kompas.id.* <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/bermunculan-kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-surabaya>
- [19] Margareta, T.S., & Jaya, M.P.S. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study kasus pada anak umur 6-7 tahun di Kertapati). *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(2), 171-180. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>
- [20] Mukhaiyarah, R., Darmawan, A., & Indartuti, E. (2024). Evaluasi Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Di DP3APPKB Surabaya: (Studi Kasus Layanan Konseling). *Journal of Administrative and Sosial Science*, 5(1), 81-91.
- [21] Nurlela, A. (2023, April). Lindungi Anak dari Eksplorasi dan Kekerasan Seksual di Ranah Daring. *Baktinews.* <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/lindungi-anak-dari-eksplorasi-dan-kekerasan-seksual-di-ranah-daring>
- [22] Oktaviani, I., & Jatiningsih, O. (2022). Stategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Surabaya. *Jurnal Konsepsi*, 11(2). 252-271. <http://www.p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/200>
- [23] Pemkot Surabaya. (2023). Wujudkan Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wali Kota Eri Kukuhkan Forum Puspa Sriandi Surabaya. *Surabaya.go.id.* <https://www.surabaya.go.id/id/berita/76532/wujudkan-kesejahteraan-perempuan-dan-perlindungan-anak-wali-kota-eri-kukuhkan-forum-puspa-sriandi-surabaya>
- [24] Pemkot Surabaya. (2023). Surabaya Kota Responsif Gender. *Surabaya.go.id.* <https://www.surabaya.go.id/id/berita/77333/surabaya-kota-responsif-gender>
- [25] Pemkot Surabaya. (2023). Cegah Kekerasan dan Pekerja Anak, DP3A-PPKB Surabaya Jejaring Dengan Toho Masyarakat. *Surabaya.go.id.* <https://www.surabaya.go.id/id/berita/74444/cegah-kekerasan-dan-pekerja-anak-dp-3-a-ppkb-surabaya-jejaring-dengan-tokoh-masyarakat>
- [26] PMK, K. (2023). Pentingnya Literasi Digital Untuk Anak-Anak. In *Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Maanusiwa Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. California Legislative Information. <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-literasi-digital-untuk-anak-anak>
- [27] PPA. (n.d.). Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak (KIE-PPA). *PPA DP3APPKB.* <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/>
- [28] Pratama, B. (2019). Sepanjang Tahun 2019, Kekerasan Terhadap Anak Rumah dan Sekolah Belum Aman. *Jatim.com.* <https://jatimnet.com/sepanjang-2019-kekerasan-terhadap-anak-rumah-dan-sekolah-belum-aman>
- [29] Rahmawati, C.P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1-10. <http://ejurnal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/2616>
- [30] Rahmawati, D., & Alya, A.S. (2023). Implementasi Puspaga Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surabaya. In *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023 dengan tema Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP.* <http://ejurnal.uwp.ac.id/lppm/index.php/prosiding/article/view/277>

- [31] Rani, F., Ismandianto, I., & Kirana, K. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 14–25. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>
- [32] Regina, N.T., Kowara, N.P., Widuri, S., & Humaedi, S. (2023). Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Role Of UNICEF In Children's Protection in Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(8), 117-124.
- [33] Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. Surabaya
- [34] Rosyidin, M. (2022). Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. *Indonesian Perspective*, 7(2), 134–144. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50775>
- [35] Safira, T., Kusuma, A. J., & Afrimadona, A. (2023). Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksplorasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 276–297. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.2990>
- [36] Sholahuddin, M. (2022). Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Surabaya Terus Bertambah. *JawaPos.Com*.
- [37] Surabaya. *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya*. Jawa Timur.
- [38] Syafnita, T. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Orang Tua Dalam Kesadaran Penggunaan Media Sosial Yang Berdampak Terhadap Kesejahteraan Dan Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 634-645
- [39] Trisnawati, M., & Rijal, N. K. (2022). Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksplorasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), 683–693. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2360>
- [40] Widiyana, E. (2023). Korban Kekerasan dan Pelecehan di Surabaya Meningkat, Ini Penyebabnya. *DetikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6500806/korban-kekerasan-dan-pelecehan-di-surabaya-meningkat-ini-penyebabnya>
- [41] Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press